

PENERAPAN LAYANAN INFORMASI BERBASIS WEBSITE DALAM MENINGKATKAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN FAKFAK

Aslamiah Astatu Rengen
NPP. 29.1860

Asdaf Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: aslamiah2709@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background: The *fakfakkab.go.id* website is one of the information service media in improving e-government in Fakfak Regency which has not been maximized by the Fakfak Regency Government. **Objective:** The purpose of this study was to determine the application of website-based information services in improving e-government in Fakfak Regency. **Objective:** The purpose of this study was to determine the application of website-based information services in improving e-government in Fakfak Regency. **Method:** This study uses a qualitative descriptive research method with an inductive approach. Data obtained through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the application of website-based information services in improving e-government in Fakfak Regency has not fully worked well and there are several obstacles. **Conclusion:** The application of website-based information services in improving e-government in Fakfak Regency has not been fully running well due to several obstacles, namely the lack of strong policies, lack of human resources (HR) and problems in infrastructure. To overcome these obstacles, it is necessary to make strong policies related to the website as a medium of information services, the recruitment of competent employees as human resources and more active in checking the facilities and infrastructure, whether they are lacking, damaged or needed to support their implementation.

Keywords: Applications, Information Services, Websites, E-government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Website *fakfakkab.go.id* merupakan salah satu media layanan informasi dalam meningkatkan e-government di Kabupaten Fakfak yang kurang dimaksimalkan penerapannya oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan layanan informasi berbasis website dalam meningkatkan e-government di Kabupaten Fakfak. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penerapan layanan informasi berbasis *website* dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Fakfak belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan terdapat beberapa kendala. **Kesimpulan:** Penerapan layanan informasi berbasis *website* dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Fakfak belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan beberapa kendala yaitu kurang kuatnya kebijakan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan permasalahan pada infrastruktur. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dibuat kebijakan yang kuat terkait *website* sebagai media layanan informasi, adanya perekrutan pegawai yang berkompeten sebagai SDM serta lebih aktif dalam memeriksa sarana dan prasarana baik yang kurang, rusak maupun yang dibutuhkan dalam menunjang penerapannya.

Kata kunci: Penerapan, Layanan Informasi, *Website*, *E-government*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini pemerintahan di seluruh dunia berlomba-lomba agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berpartisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memperbaiki sistem pelayanan dari sistem manual ke sistem modern. Perubahan sistem pelayanan ini menyebabkan semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan terkhusus pada sistem pelayanan kini berbasis elektronik atau yang disebut dengan *e-government*. (Elga, 2015)

E-government merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara merata, menyediakan informasi publik secara luas, serta menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab, dan akuntabel juga transparan terhadap masyarakat. Dalam penyelenggaraan *e-government*, dibutuhkan kesiapan dalam sumber daya manusia (SDM), regulasi, anggaran dana, sarana dan prasarana. Dalam prakteknya, *e-government* merupakan suatu kegiatan penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan *e-government* yaitu memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pemerintah yang berkepentingan dan juga sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana, murah, efektif dan efisien. (Irawan, 2013)

Electronic government (e-gov) sebagai media teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan harus dijadikan peluang dan tantangan dalam menyiapkan perangkat dan sistem jaringan teknologi informasi sehingga dapat dengan mudah diakses dan digunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Penerapan *e-government* atau pemerintah berbasis elektronik di Indonesia sejak 14 tahun yang lalu, melalui intruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi

No 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government*. Sistem informasi berbasis *website* merupakan salah satu program dalam pengembangan *e-government*. *Website* merupakan media online yang terdiri dari beberapa lembar halaman yang berfungsi menyajikan pelayanan publik agar penggunaanya khususnya masyarakat dengan mudah dapat memperoleh akses informasi dan layanan pemerintah serta dapat berpartisipasi dalam rangka demokrasi pemerintahan melalui media internet. (Mahsyur, 2014)

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang telah menerapkan *e-government* sebagai media dalam meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi terhadap publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal utama dan mendasar dalam pembangunan di Kabupaten Fakfak seperti dengan adanya *website* Kabupaten Fakfak yaitu www.fakfakkab.go.id, *Website* tersebut merupakan wujud dari pemerintah Kabupaten Fakfak untuk menerapkan transparansi dan keterbukaan di semua struktur birokrasi pemerintah sehingga masyarakat dengan jelas dapat mengetahui apa yang sedang direncanakan dan dapat mengetahui tentang jalannya pemerintahan. Sejak awal diluncurkan, Pengelolaan *website* Pemerintah Kabupaten Fakfak dikelola oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak (Humas Setda), namun seiring dengan perkembangan dan perubahan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Fakfak tepat pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfoperstatik) mengambil alih dalam pengelolaan *website* Kabupaten Fakfak.

Pada tahun 2018 *website* Kabupaten Fakfak masih beroperasi dengan konten yang mendeskripsikan tentang Kabupaten Fakfak. Dicermati dari penerapan *website* di Kabupaten Fakfak, terlihat belum dimanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada, baik sumber daya infrastruktur teknologi komunikasi, sumber daya manusia pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan sebagainya. *Website* Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak pada umumnya sudah menampilkan beberapa informasi seperti profil daerah, Agenda, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), produk hukum, portofolio, kondisi geografis, potensi, data statistik, pariwisata, portal penghubung ke *website* dinas, dan berita daerah yang terus diperbarui. Namun dalam penerapannya, isi *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak masih terdapat kekurangan data-data pendukung lain dan terkadang bermasalah pada portal karena kurang terawat. Masih banyak data yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat ditemukan disini seperti produk hukum. Adapun permasalahan lain dalam manajemen *website* pada Pemerintah Kabupaten Fakfak salah satunya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelola *website* ini dengan baik. Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa penggunaan layanan informasi berbasis *website* dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Fakfak belum sepenuhnya terlaksana dan diterapkan dengan baik sehingga perlu dilakukan penelitian yang berjudul Penerapan Layanan Informasi Berbasis *Website* dalam Meningkatkan *E-Government* di Kabupaten Fakfak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan partisipasi pemuda dalam mengawal program lorong literasi di Kelurahan Paccinongang ini. Faktor pendidikan

merupakan salah satunya. Cukup banyak pemuda di Kabupaten Gowa yang tidak melanjutkan pendidikan dengan berbagai sebab, salah satunya lebih memilih untuk mencari penghasilan karena terbatasnya kemampuan finansial keluarga. Hal ini sejalan dengan data BPS Kab. Gowa bahwa sejumlah 131.379 orang yang tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar atau Tidak Pernah Mengenyam Pendidikan memilih untuk bekerja (Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan tingkat Pendidikan) dan berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur (15 s.d. 19 tahun) yang sudah bekerja di wilayah Kabupaten Gowa sejumlah 14812 orang (BPS Kab. Gowa, 2019:61-62). Data ini menunjukkan bahwa banyaknya pemuda yang memilih untuk mencari penghasilan dengan bekerja di perusahaan/orang lain ketimbang berwirausaha. Padahal dalam mengembangkan suatu wilayah dibutuhkan peran pemuda yang berpendidikan guna menyalurkan aspirasi-aspirasi dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (meskipun dapat dilakukan sambil bekerja).

Kurangnya kesadaran pemuda untuk bersama-sama membangun daerah menjadi permasalahan berikutnya, sudah menjadi rahasia umum para sarjana muda lebih memilih merantau ke kota dibandingkan harus mengabdikan di kampung, para pemuda lebih cenderung memilih bekerja di pabrik dari pada harus menjadi petani di kampung halaman, melakukan urbanisasi ke kota dengan harapan penghasilan yang tinggi (Katherina, 2014). Hal ini menunjukkan kurang kepedulian pemuda membangun kampung halaman dengan memberikan begitu saja peran pembangunan kampung kepada pemerintah setempat.

Budaya merantau (sompe') dan bermigrasi (malleke' dapureng) bukan karena kelaparan, dapur tidak lagi berasap, tidak ada pekerjaan, daerah asalnya tandus kering, tetapi kebutuhan akan kebebasan, menjadi dorongan yang kuat untuk berubah khususnya bagi orang Bugis-Makassar berkorban dan berjuang agar diterima di lingkungan sosialnya (Kompas.com, 2008). Tidak dapat disalahkan bahwa pemuda lebih memilih merantau ke kota atau daerah lain dengan iming-iming lebih mudah memperoleh pendapatan, memperoleh kebebasan yang hakiki ketimbang terikat di kampung, dan sebagai bentuk pengakuan sosial apabila berhasil di rantau. Selanjutnya fenomena yang terjadi generasi *net* ini yakni cenderung menjadi makhluk yang anti-sosial (meskipun tidak seluruhnya), terlihat dari berbagai macam kegiatan gotong royong dengan peminat yang semakin menurun di daerah-daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, adapun 5 penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andityo Aryo Jatmiko, Retno Sunu Astuti yang berjudul Analisis Pengembangan *Electronic Government* di Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan pelayanan berbasis *e-government* khususnya *website* Pemerintah Kabupaten Demak sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode deskriptif dan analitis.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Aizzatun Nabilah, Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP, yang berjudul Penerapan *Website* Desa dalam Meningkatkan Pelayanan

Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *website* Desa Pulosari sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yakni transparansi dan akuntabilitas publik, namun kurangnya sosialisasi yang mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Pulosari mengenai peranan dan fungsi *website* Desa membuat adanya *website* desa kurang begitu efektif dalam memberikan pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Penelitian ketiga yaitu yang dilakukan oleh Rizka, Sueitri, Djumiarti dengan judul Analisis Penerapan *Website* dalam Rangka *E-Government* di Kabupaten Tegal dengan hasil penelitian Penerapan *website* di Kabupaten Tegal berada pada tahap kedua yaitu tahap pematangan, Hal ini dapat dilihat dari Support, Capacity dan Value di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif metode eksploratif.

Penelitian keempat yaitu penelitian oleh Ika Nurlaili Isnainiyah, Iin Ernawati dengan judul Optimalisasi Penggunaan *Website* Kabupaten Pandeglang untuk Penyebaran Informasi Publik dengan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar 24% berkaitan dengan studi kasus pada konten situs web. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pelatihan dan hasil evaluasi terhadap analisa kasus.

Penelitian terakhir yaitu penelitian oleh Budi Widjajanto, Yuliman Purwanto, Nova Rijati yang berjudul Analisis Layanan Informasi Publik pada *Website* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 *website* pemerintah kabupaten masih bersifat “informatif” dan didukung dengan informasi yang berkualitas. Sedangkan konten informasi publik berdasarkan UU No. 14/2008 pada situs pemerintah kabupaten di Jawa Tengah adalah 43%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, dokumentasi dan observasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andityo Aryo Jatmiko dkk, Aizzatun Nabilah dkk, Rizka dkk, Ika Nurlaili Isnainiyah dkk maupun Budi Widjajanto dkk. Disamping perbedaan lokus penelitian juga memiliki perbedaan dalam teori yang digunakan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan layanan informasi berbasis *website* dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Fakfak.

II. METODE

Lingkup penelitian yang akan peneliti kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Peneliti membatasi lingkup penelitian hanya pada tiga dimensi utama pengembangan *e-government* menurut Eko Indrajit (2016) dengan 3 dimensi yaitu elemen pendukung (*Support*), elemen kapasitas (*Capacity*) dan elemen hasil (*Value*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif pendekatan induktif.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi Data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis dengan teknik reduksi data,

penyajian data dan menarik kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Kepala Seksi, Pelaksana Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik, Kepala Seksi Perumusan Opini dan Aspirasi Publik, 2 Operator/Staff Pengelola dan 5 Masyarakat Pengguna *Website* Fakfakkab.go.id.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi, dokumentasi maupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hasil yang didapatkan berdasarkan teori Richardus Eko Indrajit terkait tiga dimensi utama pengembangan *e-government* yakni elemen pendukung (*Support*), elemen kapasitas (*Capacity*) dan elemen hasil (*Value*), yaitu :

3.1. Elemen Pendukung (*Support*)

Elemen pendukung (*Support*) merupakan elemen penting dalam penerapan layanan informasi berbasis *website* dan pengembangan *e-government* sehingga wajib dimiliki oleh setiap pemerintah daerah karena merupakan suatu dukungan. Adapun bentuk dukungan yang dapat diberikan seperti berikut:

a. Kebijakan yang Mengatur penerapan *website*

Berjalannya suatu sistem kerja membutuhkan dukungan dari pemerintah terkait sistem kerja tersebut. Dukungan itu dapat berupa Kebijakan atau aturan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah Kabupaten Fakfak dalam penerapan layanan informasi berbasis *website* untuk peningkatan *e-government* di Kabupaten Fakfak menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menerapkan *e-government* di Kabupaten Fakfak.

Peraturan atau kebijakan mengenai penerapan layanan informasi berbasis *website* dalam meningkatkan *e-governrment* di Kabupaten Fakfak belum cukup kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan pengelolaan hanya berpedoman pada surat perintah dari bupati yang menugaskan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak agar mengelola dan memberi Informasi kepada masyarakat melalui *website* fakfakkab.go.id, dan Undang-Undang maupun Peraturan secara umum yaitu Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi Nasional pengembangan *e-government*, Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

b. Kemampuan Organisasi dalam Sosialisasi Penyelenggaraan suatu sistem

Peningkatan *E-Government* di Kabupaten Fakfak tidak terlepas dari peran organisasi dalam mensosialisasikan penggunaan *website* sebagai media layanan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Fakfak perlu melakukan sosialisasi tentang adanya *website* fakfakkab.go.id sebagai media layanan informasi dalam meningkatkan dan mendukung *e-government* di Kabupaten Fakfak agar terus berkembang.

Sosialisasi mengenai penggunaan *website* sebagai media layanan informasi dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Fakkak lebih intensif dan sering kepada OPD namun belum sepenuhnya dilakukan terhadap masyarakat hal ini dibuktikan dengan informasi melewati media sosial yang kurang intensif sehingga tidak semua masyarakat tau penggunaan *website* namun hanya yang memiliki akun facebook yang mengetahuinya.

3.2. Elemen Kapasitas (*Capacity*)

Elemen *capacity* adalah unsur kemampun atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan tujuan *e-government* agar menjadi kenyataan. Ada 3 (tiga) hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

a. Ketersediaan Sumber Daya Finansial yang Memadai

Sumber daya finansial merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan layanan informasi berbasis *website*. Hal tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar agar dapat menunjang berjalannya suatu sistem. Seperti sumber daya manusia yang digunakan sebagai pelatih, biaya perawatan alat dan jaringan, dan pembiayaan lainnya.

Sumber daya finansial yang ada belum sepenuhnya optimal karena Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakkak merupakan Dinas baru yang dijalankan sehingga belum sejalan dengan visi misi dari pemerintah yang sebelumnya. Harapan kedepan dari Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik bahwa dengan terpilihnya pemimpin pemerintahan Kabupaten Fakkak yang baru yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan OPD yang ada di Kabupaten Fakkak.

b. Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai

Ketersediaan infrastruktur ini merupakan 50% kunci keberhasilan dari penerapan *e-government* ini. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, maka penerapan layanan informasi berbasis *website* dalam meningkatkan *e-government* tidak dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan observasi di lapangan, infrastruktur dalam penerapan layanan informasi berbasis *website* di Kabupaten Fakkak terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup baik dari awal terbentuknya *website* ini, karena hampir semua OPD di Kabupaten Fakkak terhubung dengan *website* ini. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa kendala baik teknis maupun non-teknis.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten khususnya pada bidang Teknologi Informasi yang mengelola *website* sebagai media layanan informasi sudah memadai, dimana Sumber daya Infrastruktur pada Teknologi Informasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dari peningkatan *e-government* ini.

c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten

Ketersediaan sumber daya manusia (sdm) dalam suatu sistem kerja yang telah dibentuk merupakan unsur penting dikarenakan dapat bertanggung jawab dalam mengelola, meningkatkan, dan mengembangkan *e-government*. Penggunaan *website* sebagai media layanan informasi kepada masyarakat tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak.

Sumber daya manusia merupakan hal utama yang penting dalam konsep penerapan *e-government* karena sumber daya manusia yang memadai akan mendorong peningkatan *e-government*, begitupun sebaliknya apa bila sumber daya manusianya tidak memadai maka dapat menghambat peningkatan *e-government*.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan, pegawai yang menguasai Teknologi dan Informasi pada bidang tersebut belum memadai. Sehingga kualitas dan kuantitas dari sdm dalam mengelola *website* fakfakkab.go.id perlu ditingkatkan lagi.

Tabel 1.

Pegawai Dinas Komunikasi Berdasarkan Latar Belakang Pendidikannya

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
Sosial	3
Teknik Informatika	4
Ekonomi	2
Manajemen	5
Ilmu Pemerintahan	1
Industri	1
Geologi	1
Biologi Lingkungan	2
Umum (SMA)	9

Sumber: Diskominfoperstatik Kabupaten Fakfak, 2021

Data diatas menunjukkan Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, dimana yang menguasai Teknologi Informatika hanya 4 (empat) orang pegawai, sedangkan yang dibutuhkan adalah pada bidang tersebut Sumber Daya Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak belum memadai dikarenakan kurangnya Sumber Daya Aparatur pada bidang Teknologi dan Informasi dan dalam analisis jabatan sehingga tidak sesuai dengan keahliannya

3.3. Elemen Hasil (*Value*)

Elemen pertama dan kedua merupakan supply side (pemberi jasa dari pihak pemerintah, sedangkan elemen ketiga (*value*) merupakan salah satu aspek yang ditinjau sisi tuntutan masyarakat (*demand side*), dengan adanya penerapan konsep tersebut *e-government* tidak ada gunanya. *e-government* tidak hanya dari kalangan pemerintah, namun juga dari masyarakat dan pihak berkepentingan.

a. Manfaat bagi Pemerintah

Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah terutama Dinas Komunikasi dalam penerapan layanan informasi berbasis *website* dalam meningkatkan e-government yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Pada intinya yaitu manfaat dari layanan informasi berbasis *website* ini tidak hanya dirasakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak saja namun pada OPD lain jugapun merasakan manfaatnya seperti pada masa pandemi seperti ini dengan adanya *website* dapat membantu kurangnya kerumunan, dan dapat menghemat ongkos angkot.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Adapun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat selaku pengguna *website* dalam memperoleh segala jenis pelayanan terutama pada layanan informasi berbasis *website* fakfakkab.go.id. *Website* dalam memberikan pelayanan informasi sudah baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pelaksanaannya sudah efektif dan efisiensi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Layanan Informasi Berbabsis *website* dalam meningkatkan e-government di Kabupaten Fakfak memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memberikan keterbukaan publik sehingga menjadi pemerintah yang transparansi, hal ini dilihat dari 3 elemen sukses yaitu. Elemen pendukung, elemen kapasitas dan elemen hasil. Hal-hal yang sudah berjalan dengan baik untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan layanan informasi berbasis *website* dalam meningkatkan e-government di Kabupaten Fakfak belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari teori Indrajit, yaitu 3 elemen yakni elemen Pendukung (Support), elemen kapasitas (capacity), elemen Hasil (Value) yang dimana masih ada kendala yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Sehingga dalam penelitian ini peneliti hanya menemukan permasalahan secara umum, dan belum di teliti lebih dalam. Dalam penelitian ini juga peneliti menyadari bahwa penggunaan referensi maupun sumber-sumber masih kurang dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan layanan informasi berbasis *webiste* dalam meningkatkan e-government di Kabupaten Fakfak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan bagi peneliti seanjutnya agar lebih banyak mencari referensi dan sumber-sumber yang akurat terkait dengan penelitian

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Fakfak khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Elga, M. P. (2015). Sistem Informasi Berbasis *Website* Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. *Sistem Informasi Berbasis Website*, 1–15.
- Irawan, B. (2013). Studi Analisis Konsep *E-Government*: Sebuah Paradigma Baru Dalam Pelayanan Publik. *Paradigma*, 2, 174–201.
- Masyhur, F. (2014). Kinerja *Website* Resmi Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Pekommas*, 17(1), 9–14. [Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=266814&Val=6557&Title=Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi Di Indonesia](http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=266814&Val=6557&Title=Kinerja%20Website%20Resmi%20Pemerintah%20Provinsi%20Di%20Indonesia)
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Musfikar, R. (2018). Kendala Dalam Implementasi *E-Government* Pada Pemerintah Kabupaten Pidie. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(1), 48–58.
- Richardus Eko, Indrajit. 2016. *Konsep Dan Strategi Electronic Government*. *Electronic Government*. 2nd ed. Yogyakarta: ANDI.
- Richardus Eko, Indrajit. 2016. *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi)*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Yuhefizar. (2013). *Cara Mudah & Murah Membangun & Mengelola governme*. Graha Ilmu.